

Strategi Komunikasi Pembangunan Implementasi Paradigma Pertanian Ramah Lingkungan di Wilayah Lahan Gambut (Studi Fenomenologi di Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas)

Akhyar Rafi'i^{*}, Rizaldy Putra Ansyari², Eka Fajriati Noor³

¹Fakultas Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada

^{2,3}Pendamping Program Food Estate, Kalimantan Tengah

^{*} *Corresponding author: akhyarafii@mail.ugm.ac.id*

Abstrak

Pertanian masih menjadi sektor yang menyumbang 13,71% terhadap PDB Indonesia (Kementan 2022). Menjawab hal tersebut, program pembangunan terus dikembangkan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan gambut. Optimalisasi lahan gambut di Kalimantan Tengah mencapai 47.000 Ha. Dalam proses pelaksanaannya cukup banyak dinamika, konflik, dan fenomena yang terjadi. Optimalisasi lahan gambut masih mendapat banyak stigma negatif dan skeptis *unconditional*. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana strategi komunikasi pembangunan dalam Implementasi Paradigma Pertanian ramah lingkungan. Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi dan etnografi digital. Berdasarkan hasil penelitian komunikasi partisipatif belum maksimal, sinergitas aktor belum optimal serta komunikasi pembangunan berkaitan dengan pertanian ramah lingkungan belum berkelanjutan. Selain itu beberapa program belum sejalan dengan prinsip pertanian ramah lingkungan. Instrumentalisasi beberapa program *top-down* cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan. Saran dari penelitian ini peningkatan FGD untuk merencanakan kebutuhan bersama, serta optimalisasi pendidikan kesadaran lingkungan.

Kata kunci: Komunikasi, Lahan gambut, Pembangunan, Pertanian

Abstract

Agriculture is still a sector that contributes 13.71% to Indonesia's GDP (Ministry of Agriculture 2022). Responding to this, development programs continue to be developed with the intensification and extensification of peatlands. Optimization of peatlands in Central Kalimantan reached 47,000 Ha. In the implementation process there are quite a lot of dynamics, conflicts, and phenomena that occur. Peatland optimization still gets a lot of negative stigma and unconditional skepticism. The purpose of this study is to analyze how the development communication strategy in implementing the eco-friendly agriculture paradigm. This research is qualitative research with a digital phenomenological and ethnographic study approach. Based on the research results, participatory communication has not been maximized, the synergy of actors has not been optimal, and development communication related to environmentally friendly agriculture has not been sustainable. In addition, several programs are not in line with the principles of environmentally friendly agriculture. The instrumentation of some of the top-down programs tends not to match the needs of the field. Suggestions from this study are increasing FGDs to plan shared needs, as well as optimizing environmental awareness education.

Keywords: communications, development, agriculture, peatlands

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan terus dikembangkan dengan masif melalui beberapa program. Tentu saja program-program ini diharapkan mampu menjadi sebuah media yang aplikatif dan juga revolusioner. Pertanian sebagai salah satu sektor strategis dalam pembangunan seringkali menjadi komponen utama dalam program pengentasan kemiskinan. Pembangunan pertanian yang mengalami kemajuan begitu pesat tentu saja tidak terlepas dari kebijakan pemerintah, optimalisasi potensi, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia pertanian.

Hingga tahun 2022 sektor pertanian masih menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam peningkatan ekonomi di Indonesia. Sektor pertanian masih menyumbang 13,71 % terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Sumbangsih sektor pertanian dalam PDB ini menunjukkan bahwa pertanian masih menjadi sektor yang ditekuni oleh masyarakat di Indonesia. Untuk mempertahankan dan meningkatkan PDB Indonesia dari sektor pertanian ini sebagai salah satu langkah meningkatkan taraf hidup masyarakat, tentunya harus selalu didukung program pembangunan pertanian, kebijakan yang menguntungkan petani, reduksi inovasi pertanian, hingga transformasi sistem pertanian yang lebih unggul (Mas'ud & Wahyuningsih, 2022).

Jika meninjau bagaimana transformasi sektor pertanian hingga ke tahap ini, maka tidak terlepas dari agenda revolusi hijau yang menjadi titik balik akan masa kejayaan pertanian di Indonesia. Meskipun tidak sedikit stigma negatif yang akan ditemukan jika berkaitan dengan revolusi hijau ini, baik bagian dari politik ekonomi pembangunan ataupun politik praksis yang terjadi. Revolusi hijau yang ditinjau secara epistemologi merupakan istilah yang dipakai untuk mendeskripsikan bagaimana adanya perubahan fundamental dalam penggunaan teknologi budidaya pertanian yang dimulai tahun 1950-1980 an (Titisari, 2012).

Beberapa karakteristik yang paling menonjol dari revolusi hijau ini adalah intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi pertanian. Intensifikasi dikenal dengan istilah panca usaha tani yaitu optimalisasi kegiatan budidaya dari pemilihan bibit unggul, hingga pemberantasan hama penyakit. Ekstensifikasi istilah yang digunakan untuk perluasan lahan pertanian dengan membuka lahan-lahan baru, baik di wilayah hutan lindung ataupun lahan gambut. Diversifikasi pertanian di era revolusi hijau adalah

bentuk implementasi dari pola tanaman tumpang sari. Rehabilitasi pertanian dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi krisis produktivitas (Renaningtyas & Hariyanti, 2021).

Namun, jika meninjau lebih kompleks dengan adanya revolusi hijau ini juga menimbulkan banyak dampak yang berkelanjutan baik secara struktural, maupun fungsional. Memang kedaulatan pangan tercapai, tetapi diversifikasi pangan terhenti karena generalisasi, ledakan hama dan penyakit, hingga kejenuhan dan kerusakan akibat penggunaan bahan kimia pertanian sintetis yang berlebihan dan tidak ramah lingkungan. Bahkan di beberapa daerah tertentu mengalami kehilangan kepercayaan terhadap penyuluh pertanian yang dianggap sebagai agen yang mensosialisasikan revolusi hijau.

Beberapa dekade telah berlalu, perubahan struktur pemerintah secara masif juga terjadi. Para pemimpin dengan semangat baru untuk mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Tahun 2020 Kementerian Pertanian meluncurkan program yang bernama "*food estate*". Program yang diluncurkan saat wabah pandemi Covid-19 melanda, tujuan awalnya adalah untuk pemenuhan pangan di masa pandemi, namun pada akhirnya sebagian orang setuju bahwa program ini adalah program balik nama dari agenda revolusi hijau. Program ini secara masif dilaksanakan di beberapa daerah di pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera dan juga Kalimantan (Firmansyah *et al.*, 2017).

Kalimantan dengan total luas lahan gambut mencapai 4,5 juta Ha tentu saja sebagian besar dan hampir keseluruhan lahan gambut di kalimantan bagian dari lahan rawa. Pengembangan lahan rawa sebagai lahan pangan masa kini dan masa depan dinilai sangat strategis dan prospektif dalam menopang ketahanan pangan, apalagi saat ini kontribusi lahan rawa pada pangsa produksi pangan nasional masih rendah. Pengembangan kawasan pangan skala luas (*food estate*) di lahan rawa Kalimantan Tengah merupakan program terobosan peningkatan produksi pangan mengingat meluasnya dampak covid-19, bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan pangan serta perubahan iklim (Nizam & Yasir, 2022).

Pengembangan kawasan *food estate* berbasis korporasi petani di lahan rawa Kalimantan Tengah disamping untuk peningkatan produksi pangan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di lokasi program karena didukung oleh potensi sumber daya alam yang mendukung serta modal sosial budaya yang mendukung. Namun beberapa konflik muncul berkaitan dengan program yang dianggap tidak ramah lingkungan. Tujuan dari penelitian ini yaitu bagaimana strategi komunikasi pembangunan dalam implementasi paradigma pertanian ramah lingkungan.

METODE

Kegiatan penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pada Bulan Januari hingga Juli Tahun 2022. Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi dan etnografi digital. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan *snowball sampling* dengan proporsi penyuluh pertanian sebagai informan kunci, petani sebagai informan utama, serta *stakeholders* lainnya sebagai informan pendukung (Murdiyanto, 2020). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi partisipan, wawancara mendalam dan studi pustaka melalui etnografi digital. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Teknik analisis data melalui beberapa tahapan yaitu pengambilan data, reduksi data, dan interpretasi data hingga penarikan kesimpulan. Sebelum penarikan kesimpulan dilakukan uji keabsahan data dengan triangulasi data, waktu, dan sumber (Ahyar *et al.*, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum

Kecamatan Kapuas Kuala terdiri dari 13 Desa dengan kondisi fisik dan potensi wilayah sebagai berikut, Tanah berasal dari tanah aluvial dan organosol bergambut (bukan vulkanik) dengan kemiringan tanah 0 – 2 pada ketinggian tempat 0 – 5 mdpl, memiliki pH 3,6 – 6,5 dengan kelembaban 60% pada temperatur 19°C - 33°C dan curah hujan rata-rata 150 - 200 mm / bulan, dikelola dengan komoditas tanaman pangan yang terdiri dari padi dan palawija dan sayuran yang ditanam secara tumpang-sari di musim penghujan dan palawija di musim mareng terutama di pematang. Di beberapa tempat terbatas sesuai dengan potensi airnya, pada musim kemarau dapat ditanami dengan sayuran di sebagian lahan, terutama lahan yang dengan status kepemilikan sebagai tanah Negara/jalur hijau, dikelola sebagai lahan dengan maksud untuk konservasi tanah. Sedangkan hutan-hutan yang lain bersifat spot-spot yang merupakan lahan petani dengan tanaman hortikultura yang dimaksudkan untuk tambahan penghasilan keluarga.

Sumber air utama untuk pertanian adalah air pasang surut karena wilayah ini adalah lahan pasang surut yang dominan untuk ditanami padi lokal maupun padi unggul lokal. Sumber air yang diangkat dari air tanah dengan debit air yang cukup tinggi tidak dapat dipergunakan untuk mengairi lahan secara langsung karena tujuan mengangkat air tanah ke permukaan untuk mengatasi kebutuhan air keluarga, bukan untuk pengairan.

Potensi Sektor Pertanian

Potensi sektor pertanian di Kecamatan Kapuas Kuala masih didominasi usaha di sub sektor budidaya tanaman. Kegiatan pengolahan hasil pertanian atau sub sektor *off farm* belum terlalu banyak, pengolahan dibidang peternakan seperti pembuatan telur asin yang cukup banyak ditemukan. Beberapa produksi rumah tangga lainnya seperti keripik singkong dan Ubi akan tetapi masih sedikit. Adapun Potensi pertanian dalam sub sektor budidaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Luas tanam komoditas utama

No	Jenis Tanaman	Luas (Ha)
1	Padi	11,073
2	Jagung	2,20
3	Semangka	8,2
4	Sayuran	8,69
5	Ubi Jalar	55

Sumber: Data Sekunder BPP Kapuas Kuala 2022

Komoditas utama yang dominan ditemukan di Kecamatan Kapuas Kuala yaitu Tanaman Padi, Jagung, Semangka, Tanaman Sayur dan juga Ubi Jalar. Tanaman Padi yang dibudidayakan mayoritas Padi lokal, hal ini dikarenakan kondisi topografi lahan yang cukup sulit untuk Padi unggul beradaptasi. Varietas padi lokal yang banyak dikembangkan yaitu Siam mutiara, usang, pandak. Sedangkan untuk varietas Unggul Baru (VUB) yang sudah didiseminasikan yaitu varietas Inpari dan Ciherang. Komoditas Tanaman sayur yang banyak dibudidayakan yaitu Kangkung, Bayam, Sawi, Terong maupun Kacang Panjang dan Buncis.

Selain potensi pada sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, Kecamatan Kapuas Kuala juga memiliki potensi pada komoditas perkebunan. Potensi pertanian komoditas perkebunan di Kecamatan Kapuas Kuala dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Luas tanam perkebunan

No	Jenis Tanaman	Luas (Ha)	%
1	Kelapa	875	86,8
2	Kopi	4	0,4
3	Karet	129	12,8
Jumlah		1008	100

Sumber: Data Sekunder BPP Kapuas Kuala 2022

Komoditas tanaman perkebunan yang dibudidayakan di Kecamatan Kapuas Kuala mayoritas tidak menjadi peruntungan utama sebagai pondasi perekonomian

masyarakat, biasanya dimanfaatkan agar lahan tidak tidur, atau istilah masyarakat disana menghindari *taung* (lahan produktif yang terbengkalai). Untuk menghindari keadaan ini biasanya ditanami komoditas perkebunan Kopi. Sehingga potensi panen kopi sering tidak diperhatikan dan tidak diperhitungkan.

Berbeda dengan komoditas perkebunan Kelapa dan Karet, Komoditas ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian masyarakat disana. Bahkan disepanjang jalan dan tepian sungai dipenuhi oleh tanaman Kelapa. Penjualan produk Kelapa ini terjadi dalam dua periode yaitu periode kelapa muda dan juga kelapa yang sudah tua untuk dijadikan santan. Untuk perkebunan Karet sendiri dipilih selain karena perawatan yang cukup sederhana, komoditas karet juga lebih resisten terhadap banjir berkala yang sering terjadi di wilayah lahan gambut. Meskipun harga panen karet cukup fluktuatif.

Strategi Komunikasi Partisipatif

Dalam kegiatan pembangunan, komunikasi menjadi sebuah instrumen yang penting dalam penyampaian informasi, diseminasi inovasi, negosiasi kebijakan, hingga sosialisasi program-program pembangunan. Artinya, baik ditinjau sebagai sebuah subjek dan objek, komunikasi masih menduduki peran yang penting sebagai atribut dalam pelaksanaan pembangunan. Strategi dalam komunikasi adalah sebuah perencanaan yang kompleks dalam penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan agar isi pesan yang disampaikan mampu terdistribusi dengan baik sehingga dapat merubah persepsi, sudut pandang, maupun perilaku individu (Jaki, 2022).

Sehingga untuk mengkomunikasikan sebuah program pembangunan ataupun diseminasi inovasi perlunya sebuah strategi komunikasi yang sesuai dengan spesifikasi lokalitas dan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan komunikasi pembangunan tersebut. Secara teoritik cukup banyak strategi komunikasi yang sudah berkembang dan diterapkan di sekeliling kita, namun kembali dipahami bahwa strategi komunikasi didesain untuk sebuah tujuan tertentu, sehingga tidak selalu sesuai ketika diimplementasikan tanpa memperhatikan karakteristik dan spesifikasi konten yang ingin disampaikan (Rangkuti, 2010).

Komunikasi partisipatif merupakan komunikasi pembangunan dalam pelaksanaan program yang *bottom-up* baik dalam diseminasi inovasi, penyampaian informasi maupun komunikasi edukasi. Karakteristik yang paling menonjol dari komunikasi partisipatif adalah para peserta pembelajar memiliki kontribusi yang lebih banyak dari rangkaian

kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dalam konsep pendidikan orang dewasa, komunikasi partisipatif didesain agar para pembelajar dapat berpikir kritis untuk menganalisis kebutuhan, potensi, masalah dan rencana pengembangan baik dalam rangka kapasitas sumberdaya manusia maupun kompleksitas sarana dan prasarana. Sehingga komunikasi partisipatif sebagai sebuah strategi komunikasi merupakan pendekatan yang aplikatif berkaitan dengan kebutuhan subjek pembangunan (Leha, 2021).

Kegiatan pertanian di wilayah lahan gambut sudah dilakukan sejak beberapa dekade lalu, konsep ramah lingkungan sudah jauh ketinggalan ketika pembangunan pertanian hanya berorientasi pada produksi dan produktivitas. Konsep ekstensifikasi pada lahan gambut dengan pembukaan lahan yang tidak ramah lingkungan, pembakaran hutan, hingga alih fungsi lahan sesuatu yang sering ditemukan, termasuk di kecamatan Kapuas Kuala. Kegiatan intensifikasi yang banyak bergantung pada pupuk dan pestisida kimia juga aktivitas sektor pertanian yang sangat tidak ramah lingkungan.

Komunikasi partisipatif yang dirancang belum berjalan optimal sehingga menimbulkan beberapa ketimpangan. Selain karena kurangnya kesadaran untuk menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan, pendidikan ramah lingkungan juga kurang optimal baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sejak perencanaan pembangunan paradigma pertanian ramah lingkungan tidak menjadi tujuan utama, sehingga semakin berkelanjutan pola-pola egosentris atas produktivitas yang tinggi. Selain itu, dalam komunikasi partisipatif yang seharusnya fasilitator mempunyai kuasa untuk mengarahkan, kehilangan kuasa atas kedudukannya, entah karena kepentingan politik maupun kepentingan pribadi.

Secara hakikat komunikasi partisipatif tidak berjalan dengan optimal bukan berarti implementasi teoritis yang belum sesuai, akan tetapi subjek dalam komunikasi tidak berasal pada *standing position* yang sama berkaitan dengan pertanian ramah lingkungan. Sehingga sebelum semakin terlalu jauh, langkah yang tepat adalah dekonstruksi perilaku yang dimulai dari pendidikan kesadaran lingkungan. Peran aktor dalam komunikasi partisipatif ini juga harus dilakukan optimalisasi baik secara struktural maupun fungsional.

Sinergitas Aktor dalam Komunikasi Pembangunan

Dalam pelaksanaan komunikasi pembangunan terdapat beberapa entitas subjek pembangunan didalamnya, baik sebagai komunikator maupun komunikan. Subjek atau entitas ini memiliki peran sebagai aktor dalam kegiatan komunikasi pembangunan. Dalam komunikasi partisipatif tentunya saja jumlah aktor menjadi lebih banyak, sehingga untuk

menyamakan sudut pandang terhadap pencapaian tujuan perlu dilakukan sebuah sinergitas aktor dalam komunikasi pembangunan. Setiap aktor dalam kegiatan komunikasi pembangunan memiliki kedudukan dan peranan yang berbeda pula baik secara struktural maupun fungsional. Peran yang dijalankan oleh para aktor ini memiliki kemungkinan tidak terlaksana dengan optimal baik karena ketidakmampuan menjalankan peran ataupun adanya pengaruh kekuasaan yang melemahkan. Sebuah sinergitas aktor dalam komunikasi pembangunan bertujuan untuk membawa para aktor dalam sebuah sudut pandang yang serupa dengan tujuan yang sama (Fatkhullah *et al.*, 2021).

Penyuluh pertanian maupun fasilitator lainnya merupakan aktor kunci dalam komunikasi partisipatif dalam komunikasi pembangunan di Kecamatan Kapuas Kuala. Dalam ini fasilitator menjadi jembatan yang kompleks terhadap aktor utama maupun aktor pendukung dalam kelangsungan program pembangunan. Peran aktor kunci dalam hal ini belum maksimal baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam perspektif kuantitas fasilitator cenderung jarang melakukan komunikasi, negosiasi dan diskusi secara menyeluruh kepada sasaran sehingga kesannya hanya menjadi subjek penyampai informasi ketika ada program dan bantuan. Secara kualitas tidak benar-benar mawadahi para petani, sehingga menyebabkan terlalu mandiri dan kehilangan kontrol kekuasaan dalam beberapa hal. Perlu banyak berbenah bagi para fasilitator disana untuk membangun sinergitas kompleks yang lebih optimal (Irmawati *et al.*, 2022).

Para petani sebagai aktor utama memiliki peranan dan kedudukan yang juga tidak kalah penting dalam komunikasi partisipatif pembangunan. Petani dan masyarakat yang secara luas terlalu terbiasa untuk “disuapi” dengan program pembangunan dengan pendanaan instan cenderung ketagihan dan suka bergantung. Berjalan sendiri bukan berarti mandiri tapi ketidakmauan dan ketidakberanian untuk berpartisipasi lebih aktif lagi. Petani cenderung terlalu pasif dalam komunikasi partisipatif sehingga selalu mengandalkan instruksi dan preferensi atasan, sedangkan fasilitator juga memiliki keterbatasan untuk selalu mendampingi. Petani sebagai aktor utama harus memiliki kesadaran yang lebih baik bahwa dalam hal pembangunan mereka ujung tombaknya, pemerintah dan fasilitator adalah jembatan, sebagai subjek pembangunan petani punya hak prerogatif untuk merencanakan pengembangan potensi yang ingin dilakukan. Optimalisasi sinergitas aktor dalam perspektif petani dimulai dengan membangun kesadaran dan peningkatan partisipasi.

Pemerintah dan Instansi terkait sebagai aktor pendukung juga memiliki kedudukan dan peran yang cukup penting. Hal ini sejalan dengan teori strukturasi yang dikemukakan oleh Giddens bahwa struktur sosial mempunyai kemampuan natural dalam menciptakan sistem sosialnya sendiri, sehingga dalam hal ini aktor pendukung menduduki peranan yang krusial untuk menciptakan lingkungan yang partisipatif agar para petani berkembang dengan optimal. Pemerintah Kecamatan Kapuas Kuala sudah menciptakan sistem lingkungan yang lumayan kooperatif, namun masih belum optimal karena program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah kabupaten berfokus kepada pembangunan pariwisata. Sedangkan instansi terkait seperti Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Kapuas Kuala dan Dinas Pertanian cukup berperan dengan baik berkaitan dengan program pembangunan *Top-down*. Namun, dengan keterbatasan jangkauan intensitas kontrol penyuluh lapangan masih belum optimal.

Kompleksitas sinergitas para aktor ini menjadi sebuah urgensi yang berkelanjutan untuk keselarasan aksi, tujuan dan pencapaian dalam pembangunan. Sinergitas dalam komunikasi pembangunan yang dilakukan tercermin dari kesatuan instruksi dan pola dukungan yang diberikan. Optimalisasi sinergitas peran aktor dalam komunikasi pembangunan di Kecamatan Kapuas Kuala dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran peran aktor baik secara struktural maupun fungsional.

Implementasi Paradigma Pertanian Ramah Lingkungan

Pertanian ramah lingkungan di daerah lahan gambut seperti sesuatu yang kontradiksi, hal ini selaras dengan pembukaan lahan sebagai kegiatan awal pun sudah dilakukan dengan tidak ramah lingkungan. Tidak selaras bukan berarti tidak ada, masih memungkinkan untuk menemukan pelaku usaha yang menerapkan prinsip-prinsip pertanian ramah lingkungan meskipun tidak dengan kontekstual yang kompleks (Rosmini *et al.*, 2019).

Paradigma sebagai sebuah keyakinan atau kepercayaan dasar seseorang dalam bertindak cenderung banyak sekali mempengaruhi perilaku baik tindakan terencana maupun tidak. Secara epistemologi paradigma mempengaruhi dan menentukan bagaimana seseorang akan berpikir dan bagaimana memandang segala sesuatu. Paradigma yang dibawa dalam mempersepsikan suatu hal juga akan mempengaruhi objektivitas penilaian nantinya (Permana, 2019).

Implementasi paradigma pertanian ramah lingkungan pada petani dan masyarakat yang ada di Kecamatan Kapuas Kuala belum dilaksanakan dengan optimal. Tentu saja

banyak faktor yang menyebabkan ini diantaranya adalah kesadaran internal, pola hidup dan kebiasaan, hingga kurangnya pendidikan kesadaran lingkungan. Ditambah dengan beberapa program yang juga tidak ramah lingkungan sehingga kebiasaan hidup tidak ramah lingkungan semakin berkelanjutan. Dewasa ini, mulai sedikit ada pergerakan positif berkaitan dengan kesadaran untuk melakukan aktivitas berbasis ramah lingkungan, tentunya ini tidak terlepas dari aktor masyarakat sebagai subjek kunci dan agen perubahan (Humaida *et al.*, 2020).

Kesadaran ini mulai muncul ketika masyarakat disana mulai kesulitan mendapatkan pupuk anorganik subsidi baik dari keterbatasan jumlah, ketepatan waktu dan ketersediaan pupuk. Disamping itu masyarakat disana memiliki limbah kotoran ternak yang belum dimanfaatkan dengan optimal. Sehingga dengan analisis kebutuhan partisipatif dibangunlah sebuah Unit Produksi Pupuk Organik (UPPO) di Kecamatan Kapuas Kuala. Sehingga keberadaanya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat disana untuk memulai kegiatan yang ramah lingkungan khususnya di sektor pertanian.

Peningkatan kuantitas dan kualitas implementasi paradigma pertanian ramah lingkungan ini seharusnya diimplementasikan dalam berbagai tingkatan usia maupun strata pendidikan, apalagi dominasi masyarakat disana begitu dekat dengan pertanian. Setidaknya anak-anak sekolah dasar mengetahui hal-hal mendasar aktivitas yang berbasis ramah lingkungan. Pendidikan ramah lingkungan ini tentu saja bukan sesuatu yang instan, tetapi butuh kesadaran internalisasi yang berkelanjutan.

Rekonstruksi Program *Top-down*

Pembangunan sebagai sebuah aksi untuk mensejahterakan masyarakat tentunya didesain dapat memberikan progres, baik dalam kapasitas ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Dalam hal ini pembangunan didesain melalui banyak program sebagai jawaban dan penyelesaian dari masalah lapangan. Secara teoritik program yang didesain seharusnya berbasis kebutuhan dan tentu saja potensi yang ada dilingkungan tersebut. Secara umum program pembangunan ada yang bersifat *top-down* dan *bottom-up*. Program pembangunan *top-down* biasanya berasal dari instruksi kebijakan pusat, sedangkan pembangunan *bottom up* berdasarkan kebutuhan sasaran yang dirumuskan secara mandiri. Program pembangunan *top-down* tidak selalu buruk, serta program pembangunan *bottom-up* juga tidak selalu baik. Untuk optimalisasi keduanya dibutuhkan rekonstruksi yang sedikit kompleks namun harus berkelanjutan. Sebuah rekonstruksi

dibutuhkan guna mereduksi hal-hal yang belum maksimal, misalnya perbaikan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program (Istiqomah, 2021).

Rekonstruksi dalam pelaksanaan program *top-down* tidak menghentikan atau merombak penuh pelaksanaan suatu program, akan tetapi perlu adanya adaptasi dan revitalisasi teknis didalamnya, tujuannya tentu agar program lebih aplikatif dan dapat diimplementasikan lebih baik oleh sasaran. Beberapa program yang ada di Kecamatan Kapuas Kuala perlu sekali dilakukan rekonstruksi dengan pertimbangan spesifikasi lokal. Misalnya saja pada program penanaman padi unggul varietas baru yang memang secara spesifik lokasi tidak cocok dan sudah beberapa kali mengalami gagal panen namun terus dilanjutkan dengan dalih karena ini program bantuan dan inovasi baru. Namun melalui kejadian ini seharusnya dapat menjadi evaluasi yang kritis terhadap diseminasi inovasi yang dilakukan.

Ketidaktepatan lainnya misalnya pada lahan yang baru dibuka hasil dari ekstensifikasi lahan gambut yang minim unsur hara, langsung direkomendasikan penanaman padi unggul sesuai instruksi program, dan juga langsung penggunaan produk pupuk dan pestisida sintesis. Sebuah *logical fallacy* yang terus ada dan berkelanjutan. Hal-hal teknis seperti inilah yang perlu banyak sekali adaptasi sebagai sebuah bentuk rekonstruksi terhadap program *top-down*. Pelaksanaan rekonstruksi ini tentu tidak mudah apalagi melibatkan banyak pihak, selain kesadaran sasaran pembangunan, pemerintah dan instansi terkait juga memiliki andil yang krusial dalam mensukseskan rekonstruksi program ini (Soeswoyo, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Strategi Komunikasi pembangunan melalui komunikasi partisipatif belum maksimal. Sinergitas aktor belum optimal serta komunikasi pembangunan berkaitan dengan pertanian ramah lingkungan belum berkelanjutan. Selain itu beberapa program belum berjalan sesuai dengan prinsip ramah lingkungan, sehingga dalam program pembangunan yang bersifat *top-down* perlu adanya adaptasi sebagai sebuah rekonstruksi program. Peningkatan implementasi paradigma pertanian ramah lingkungan dimulai dengan membangun kesadaran internal, meningkatkan kuantitas FGD berkaitan dengan kebutuhan bersama berbasis potensi dan spesifikasi lokal serta optimalisasi pendidikan kesadaran lingkungan mulai dari hal-hal mendasar pada kalangan usia yang bervariasi dan tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Fatkhullah, M., Mulyani, I., & Imawan, B. (2021). Strategi Pengembangan Masyarakat Petani Lahan Gambut melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Analisis Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan. *Journal of Social Development Studies*, 2(2), 15–29. <https://doi.org/10.22146/jsds.2186>
- Firmansyah, H., Yulianti, M., & Alif, M. (2017). *Sumberdaya Manusia di Sektor Pertanian Kalimantan Selatan Communication Strategy in Enhancing Institutional Capacity on Peatland Management through Improving Human Resource in Agricultural Sector of South Kalimantan*. 319–322.
- Humaida, N., Aula Sa'adah, M., Huriyah, H., & Hasanatun Nida, N. (2020). Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Islam. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 131. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3483>
- Irmawati, I., Saleh, S., & Akbar, A. (2022). Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Mendukung Pertanian Ramah Lingkungan Di Desa Bontomanai Kecamatan Bangkala Kabupaten Jenepoto. *Jurnal Agribisnis Dan Komunikasi Pertanian (Journal of Agribusiness and Agricultural Communication)*, 5(2), 81. <https://doi.org/10.35941/jakp.5.2.2022.8685.81-90>
- Istiqomah. (2021). Pemberdayaan Perempuan di Masa Pandemi: Studi Kelompok Wanita Tani (KWT) Silih Asih Sindangjawa, Kuningan. *Mawa Izh Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 12(1), 15–32. <https://doi.org/10.32923/maw.v12i1.1728>
- Jaki, A. (2022). Strategi Komunikasi Lingkungan Berbasis Carbon Trading Pada PT. Rimba Makmur Utama. *Jurnal Mutakallimin : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2). <https://doi.org/10.31602/jm.v5i2.7658>
- Leha, A. (2021). Strategi Komunikasi Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan (Wahli Sumsel) Pada Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan. *Skripsi Sarjana S I Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya*, 6.
- Mas'ud, & Wahyuningsih, S. (2022). *Analisis Pdb Sektor Pertanian Tahun 2022 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian 2022*.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Bandung: Rosda Karya*. http://www.academia.edu/download/35360663/Metode_Penelitian_Kualitaif.Doc
x
- Nizam, R. M., & Yasir, Y. (2022). Perencanaan Komunikasi Corporate Social Responsibility Pertamina RU II Sei Pakning dalam Pengembangan Ekowisata

Arboretum Gambut. *Expose: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 1.
<https://doi.org/10.33021/exp.v5i1.1617>

Permana, M. (2019). Analisis pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Prosiding SNMEB (Seminar Nasional ...)*, 2018.
<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/Prosnmeh/article/view/5093>

Rangkuti, P. A. (2010). Peran Komunikasi dalam Modernisasi Pertanian Berbasis Koperasi. *Jurnal Pembangunan*, 08(1), 42–50.

Renaningtyas, S., & Hariyanti, P. (2021). Penerapan Komunikasi Penyuluhan Pertanian Milenial pada Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) di Desa Betet Kabupaten Nganjuk Jawa Timur The Application of Millennial Agricultural Extension Communication at the Self-help Agricultural and Ru. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi*, 1, 67–80.
<https://journal.uui.ac.id/cantrik/article/view/19392/12077>

Rosmini, R., Lakani, I., & Najamudin, N. (2019). Pengembangan Potensi Masyarakat Melalui Penerapan Sistem Pertanian Berkelanjutan Di Kecamatan Bukal Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Abditani*, 2(1), 22–28.
<https://doi.org/10.31970/abditani.v1i0.16>

Soeswoyo, D. M. (2020). Peningkatan Kualitas Masyarakat Melalui Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona. *Jurnal Pemberdayaan Pariwisata*, 2(1).

Titisari, K. E. A. (2012). Strategi Komunikasi Edukasi Pertanian Ramah Lingkungan di Gubug Selo Merapi. *Skripsi Sarjana S I*.